

# EKSPOR IMPOR



Dewi Mahrani Rangkuty, S.E., M.Si.  
Pangeran, S.E., M.SP.

# EKSPOR IMPOR

Dewi Mahrani Rangkuty, S.E., M.Si.  
Pangeran, S.E., M.SP.



**Tahta Media Group**

## UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

### **Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4**

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

### **Pembatasan Pelindungan Pasal 26**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

### **Sanksi Pelanggaran Pasal 113**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).



REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

## SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka pelindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan	: EC00302377348, 6 September 2023
<b>Pencipta</b>	
Nama	: Dewi Mahrani Ranglady, S.E., M.Si, dan Pangran, S.E., M.S.P.
Alamat	: Jl. Irian Sibero Lk. IV Kel. Safomukti, Kec. Kota Kisaran Barat, Kab. Asahan, Kisaran Barat Kota, Asahan, Sumatera Utara, 21217 Indonesia
Kewarganegaraan	: Indonesia
<b>Pemegang Hak Cipta</b>	
Nama	: Dewi Mahrani Ranglady, S.E., M.Si, dan Pangran, S.E., M.S.P.
Alamat	: Jl. Irian Sibero Lk. IV Kel. Safomukti, Kec. Kota Kisaran Barat, Kab. Asahan, Kisaran Barat Kota, Asahan, Sumatera Utara, 21217 Indonesia
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis Ciptaan	: <b>Buku</b>
Judul Ciptaan	: <b>EKSPOR IMPOR</b>
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia	: 6 September 2023, di Medan
Jangka waktu pelindungan	: Bertaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
Nomor pencatatan	: 000510301

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atas produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



d.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Anggoro Dismanto  
NIP. 196412081991031002

#### Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

# EKSPOR IMPOR

Penulis:

Dewi Mahrani Rangkuty, S.E., M.Si.  
Pangeran, S.E., M.SP.

Desain Cover:

Tahta Media

Editor:

Miftahul Jannah, S.E.

Proofreader:

Tahta Media

Ukuran:

ix,159, Uk: 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-623-147-140-6

Cetakan Pertama:

September 2023

---

Hak Cipta 2023, Pada Penulis

---

Isi diluar tanggung jawab percetakan

---

Copyright © 2023 by Tahta Media Group

All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau  
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini  
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

**PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP**  
**(Grup Penerbitan CV TAHTA MEDIA GROUP)**  
Anggota IKAPI (216/JTE/2021)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan buku “Ekspor Impor” ini dengan baik. Penulis juga bersyukur atas petunjuk dan pertolongan Allah SWT maka penulis dapat menyelesaikan buku sebagai tambahan referensi bahan ajar sesuai dengan waktu yang diharapkan. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Buku ini dapat terselesaikan karena bantuan dan kerja sama dari berbagai pihak. Penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung dalam menyelesaikan buku ini.

Penulis menyadari buku ini masih banyak memiliki kekurangan dan jauh dari sempurna. Namun harapan penulis semoga buku ini bermanfaat kepada seluruh pembaca dan penulis selanjutnya.

Semoga Allah SWT selalu memberikan dan melindungi kita semua. Aamiin.

Medan, Agustus 2023

Tim Penulis

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB 1 PERDAGANGAN INTERNASIONAL.....</b>	<b>1</b>
A. Definisi Perdagangan Internasional.....	1
B. Kebijakan Perdagangan Internasional .....	5
C. Pembayaran Internasional.....	6
D. Neraca Pembayaran Internasional .....	12
E. Sebab Timbulnya Perdagangan Internasional .....	20
F. Dampak Perdagangan Internasional Terhadap Perekonomian Indonesia.....	20
<b>BAB 2 HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL.....</b>	<b>22</b>
A. Definisi Hukum Perdagangan Internasional.....	22
B. Ruang Lingkup Hukum Perdagangan Internasional.....	25
C. Tujuan Hukum Perdagangan Internasional .....	28
D. Prinsip-prinsip Hukum Perdagangan Internasional .....	28
E. Sumber Hukum Dagang Internasional .....	30
F. Permasalahan-permasalahan Dalam Hukum Perdagangan Internasional .....	37
<b>BAB 3 EKSPOR IMPOR.....</b>	<b>39</b>
A. Kegiatan Ekspor Impor.....	39
B. Prosedur Ekspor.....	40
C. Prosedur Impor .....	45
D. Penerapan K3 di Bidang Ekspor Impor .....	46
E. Masalah-masalah dalam Kegiatan Ekspor Impor .....	64
F. Pihak yang Terlibat dalam Kegiatan Ekspor Impor .....	68
<b>BAB 4 TEORI INFLASI DAN KURS .....</b>	<b>69</b>
A. Definisi Inflasi dan Kurs .....	69
B. Teori Inflasi dan Kurs.....	72
C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Inflasi dan Kurs .....	82
D. Pengukuran Inflasi dan Kurs .....	89
E. Jenis dan Pengendalian Inflasi dan Kurs .....	95
F. Dinamika dan Karakteristik Inflasi dan Kurs di Indonesia .....	106

G. Dampak Inflasi dan Kurs terhadap Ekspor dan Impor .....	118
<b>BAB 5 NERACA PEMBAYARAN INTERNASIONAL .....</b>	<b>126</b>
A. Definisi Neraca Pembayaran Internasional .....	126
B. Beberapa Pengertian “ <i>Balance</i> ” dalam Suatu Neraca Pembayaran	129
C. Masalah dalam Analisis Neraca Pembayaran.....	130
D. Neraca Pembayaran Internasional Indonesia.....	132
<b>BAB 6 STUDI KASUS: PEMULIHAN KEGIATAN EKSPOR IMPOR DALAM MENOPANG KESTABILAN EKONOMI SEBELUM DAN SELAMA PENDEMI COVID-19 DI INDONESIA .....</b>	<b>142</b>
A. Perkembangan Ekspor .....	142
B. Perkembangan Impor.....	143
C. Perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK).....	143
D. Perkembangan Inflasi .....	144
E. Perkembangan Kurs.....	145
F. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi .....	145
G. Vector Autoregression (VAR).....	146
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>157</b>
<b>BIOGRAFI PENULIS .....</b>	<b>159</b>



## DAFTAR TABEL

1.1.	Perbandingan Korporat dan Nasional .....	12
1.2.	Rincian Neraca Pembayaran Indonesia .....	15
1.3.	Ringkasan Neraca Pembayaran Indonesia .....	16
1.4.	Ekspor Kelompok Barang Manufaktur .....	17
1.5.	Nilai Ekspor Kelompok Komoditas Pertanian .....	17
1.6.	Nilai Ekspor Kelompok Komoditas Pertambangan .....	18
1.7.	Penarikan Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri Pemerintah .....	18
1.8.	Posisi Pinjaman Luar Negeri Pemerintah dan Perusahaan Pemerintah .....	19
3.1.	Probability (Kemungkinan).....	57
3.2.	<i>Consequence/Severity</i> (Keparahan).....	58
3.3.	Matriks Penilaian Tingkat Risiko.....	59
5.1.	Struktur Neraca Pembayaran Internasional.....	132
5.2.	Rangkuman Pemikiran Teori Keynesian.....	138
5.3.	Kemungkinan Kondisi Awal Suatu Neraca.....	141
6.1.	Uji Koitegrasi Johanse .....	146
6.2.	VAR Lag 1 dan Lag 2 .....	147
6.3.	Rangkuman Hasil Analisis <i>Vector Autogression</i> .....	148
6.4.	Ringkasan <i>Respon Fuction</i> Ekspor .....	149
6.5.	Ringkasan <i>Respon Fuction</i> Impor .....	150
6.6.	Ringkasan <i>Respon Fuction</i> Indeks Harga Konsumen (IHK) .....	151
6.7.	Ringkasan <i>Respon Fuction</i> Inflasi.....	151
6.8.	Ringkasan <i>Respon Fuction</i> Kurs .....	152
6.9.	Ringkasan <i>Respon Fuction</i> Produk Domestik Bruto.....	153
6.10.	Rekomendasi Kebijakan Ekspor .....	153
6.11.	Rekomendasi Kebijakan Impor.....	154
6.12.	Rekomendasi Kebijakan Indeks Harga Konsumen (IHK) .....	154
6.13.	Rekomendasi Kebijakan Inflasi .....	155
6.14.	Rekomendasi Kebijakan Kurs.....	155
6.15.	Rekomendasi Kebijakan Produk Domestik Bruto.....	156

## DAFTAR GAMBAR

1.1.	Keseimbangan Harga di Pasar Internasional.....	4
3.1.	Teori <i>Domino Heinrich</i> .....	47
3.2.	Teori <i>Bird and Germain's Loss Causation</i> .....	48
3.3.	Model <i>Energy Damage</i> .....	49
3.4.	<i>Generalised Time Sequence Model</i> .....	50
3.5.	Model Kecelakaan <i>Epidemiological</i> .....	51
3.6.	<i>Reason's Swiss Cheese Model</i> .....	52
3.7.	Klasifikasi Risiko.....	55
4.1.	<i>Inflationary Gap</i> .....	74
4.2.	<i>Exchange Rate in The Short Run</i> .....	80
4.3.	<i>Exchange Rate in The Long Run</i> .....	81
4.4.	<i>Demand Full Inflation dan Cost Push Inflation</i> .....	84
4.5.	Permintaan dan Penawaran Agregat dan Kurva Philip.....	85
4.6.	Peningkatan Jumlah Uang Beredar dan Inflasi.....	86
4.7.	Mekanisme Transmisi Nilai Tukar Ke Inflasi.....	88
4.8.	Disagregasi Inflasi.....	90
4.9.	Kurva <i>Demand Pull Inflation</i> .....	97
4.10.	Alur Penetapan Sasaran Inflasi.....	103
4.11.	Koordinasi Pengendalian Inflasi.....	106
4.12.	Perkembangan Inflasi di Indonesia Tahun 1969-2021 (%).....	107
4.13.	Perkembangan Nilai Tukar Rupiah Tahun 1950-2003.....	111
4.14.	Mekanisme Transmisi Nilai Tukar ke Inflasi.....	119
4.15.	Perkembangan Kurs dan Inflasi 1950-2003.....	121
4.16.	<i>J-Curve</i> .....	123
4.17.	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi dan Kurs 1950-2003.....	125
5.1.	Skema Perkembangan Teori Neraca Pembayaran Internasional.....	135
5.2.	Bekerjanya Mekanisme Dalam Neraca Perdagangan.....	137
6.1.	Perkembangan Ekspor di Indonesia Tahun 2007 s/d 2021.....	142
6.2.	Perkembangan Impor di Indonesia Tahun 2007 s/d 2021.....	143
6.3.	Perkembangan IHK di Indonesia Tahun 2007 s/d 2021.....	143
6.4.	Perkembangan Infasi di Indonesia Tahun 2007 s/d 2021.....	144
6.5.	Perkembangan Kurs di Indonesia Tahun 2007 s/d 2021.....	145
6.6.	Perkembangan Produk Domestik Bruto di Indonesia Tahun 2007 s/d 2021.....	145
6.7.	Grafik Stabilitas Lag Struktur.....	147



# BAB 1

## PERDAGANGAN INTERNASIONAL

### A. DEFINISI PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri suatu negara tidak hanya dapat dilakukan dengan memproduksi atau menghasilkan barang/jasa sendiri di dalam negerinya namun dapat juga dilakukan dengan membeli barang/jasa yang dihasilkan oleh negara lain. Adanya sistem perekonomian terbuka, dapat mendorong suatu negara melakukan kerja sama perdagangan internasional dalam memenuhi kebutuhan konsumsi penduduk di negara tersebut. Baik dalam kegiatan menjual ataupun membeli barang/jasa. Kegiatan perdagangan internasional memberikan keuntungan suatu negara dalam hubungannya di pasar dunia. Kegiatan perdagangan internasional tersebut adalah ekspor dan impor.

Perdagangan internasional merupakan hal yang sudah mutlak dilakukan oleh setiap negara. Pada saat ini tidak ada satu negara pun yang berada dalam kondisi autarki atau negara yang terisolasi tanpa adanya hubungan ekonomi dengan negara lain. Hal ini disebabkan karena tidak ada negara yang bisa memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Terjadinya perdagangan internasional didasari karena adanya perbedaan sumber daya yang dimiliki oleh tiap wilayah atau negara. Serta kemampuan suatu negara dalam memproduksi suatu barang maupun jasa. Sebagai ilustrasinya adalah ketika suatu negara ingin memproduksi suatu barang namun biaya produksi suatu barang tersebut lebih mahal jika dibandingkan dengan membeli barang tersebut dari negara lain. Maka, negara tersebut akan lebih memilih untuk membelinya dari negara lain. Perdagangan internasional hanya bisa terjadi apabila perdagangan tersebut menguntungkan masing-masing pihak yang bertransaksi (Sa'idy, 2013).

Menurut Nopirin (1999) perdagangan internasional merupakan suatu hubungan antara satu negara dengan negara lain dalam bentuk hubungan ekonomi seperti jual beli barang dan jasa maupun uang dengan tujuan memperoleh keuntungan (gain) dan untuk menjalin kerjasama di bidang internasional. Terjadinya perdagangan internasional antara satu negara dengan negara lainnya dapat mendorong kerja sama yang lebih erat antar sesama negara di dunia. Sehingga dengan adanya perdagangan luar negeri dapat menguntungkan antar negara satu sama lainnya, baik di bidang ekonomi maupun bidang sosial lainnya.

Menurut Sukirno (2003), manfaat perdagangan internasional adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan hasil produksi di setiap negara. Faktor-faktor tersebut diantaranya: kondisi geografi, iklim, tingkat penguasaan iptek dan lain-lain. Dengan adanya perdagangan internasional, setiap negara mampu memenuhi kebutuhan yang tidak diproduksi sendiri.
2. Memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Sebab utama kegiatan perdagangan luar negeri adalah untuk memperoleh keuntungan yang diwujudkan oleh spesialisasi. Walaupun suatu negara dapat memproduksi suatu barang yang sama jenisnya dengan yang diproduksi oleh negara lain, tetapi ada kalanya lebih baik apabila negara tersebut mengimpor barang tersebut dari luar negeri.
3. Memperluas pasar dan menambah keuntungan. Terkadang, para pengusaha tidak menjalankan mesin-mesinnya (alat produksinya) dengan maksimal karena mereka khawatir akan terjadi kelebihan produksi, yang mengakibatkan turunnya harga produk mereka. Dengan adanya perdagangan internasional, pengusaha dapat menjalankan mesin-mesinnya secara maksimal, dan menjual kelebihan produk tersebut keluar negeri.
4. Transfer teknologi modern. Perdagangan luar negeri memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih efisien dan cara-cara manajemen yang lebih modern.

Dengan demikian terjadinya perdagangan internasional antar satu negara dengan negara lainnya dapat disebabkan oleh beberapa alasan, diantaranya disebabkan karena perbedaan harga, selera, pendapatan, karena jumlah produksi domestik dan disebabkan karena kurs yang terdepresiasi atau terapresiasi. Tujuan perdagangan internasional adalah memperoleh keuntungan antar negara yang satu dengan negara yang lainnya dalam pasar internasional.

Menurut (Fajrina, 2008) teori perdagangan internasional terbagi atas 3 yaitu sebagai berikut:

#### 1. Teori Klasik

##### a. *Absolute Advantage* Adam Smith

Teori *Absolute Advantage* lebih mendasarkan pada besaran/variabel riil bukan moneter sehingga sering dikenal dengan nama teori murni (*pure theory*) perdagangan internasional. Murni dalam arti bahwa teori ini memusatkan perhatiannya pada variabel riil seperti misalnya nilai suatu barang diukur dengan banyaknya tenaga kerja yang dipergunakan untuk menghasilkan barang. Makin banyak tenaga kerja yang digunakan akan makin tinggi nilai barang tersebut (*Labor Tehory of value*).

Teori *absolute advantage* Adam Smith yang sederhana menggunakan teori nilai tenaga kerja. Teori nilai kerja ini bersifat sangat sederhana sebab menggunakan anggapan bahwa tenaga kerja itu sifatnya homogen serta merupakan satu-satunya faktor produksi.

b. *Comparative Advantage* JS Mill

Teori ini menyatakan bahwa suatu negara akan menghasilkan dan kemudian mengekspor suatu barang yang memiliki *comparative advantage* terbesar dan mengimpor barang yang dimiliki *comparative disadvantage* (suatu barang yang dapat dihasilkan dengan lebih murah dan mengimpor barang yang kalau dihasilkan sendiri memakan ongkos yang besar). Teori ini menyatakan bahwa nilai suatu barang ditentukan oleh banyaknya tenaga kerja yang dicurahkan untuk memproduksi barang tersebut.

2. **Comparative Cost David Ricardo**

a. *Cost Comparative Advantage*

Menurut teori *cost comparative advantage (labor efficiency)*, suatu negara akan memperoleh manfaat dari perdagangan internasional jika melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang dimana negara tersebut dapat memproduksi relatif lebih efisien serta mengimpor barang di mana negara tersebut memproduksi relatif kurang/tidak efisien. Berdasarkan contoh hipotesis di bawah ini maka dapat dikatakan bahwa teori comparative advantage dari David Ricardo adalah *cost comparative advantage*.

b. *Production Comparative Advantage*

Suatu negara akan memperoleh manfaat dari perdagangan internasional jika melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang dimana negara tersebut dapat memproduksi relatif lebih produktif serta mengimpor barang dimana negara tersebut memproduksi relatif kurang/tidak produktif.

3. **Teori Modern H-O**

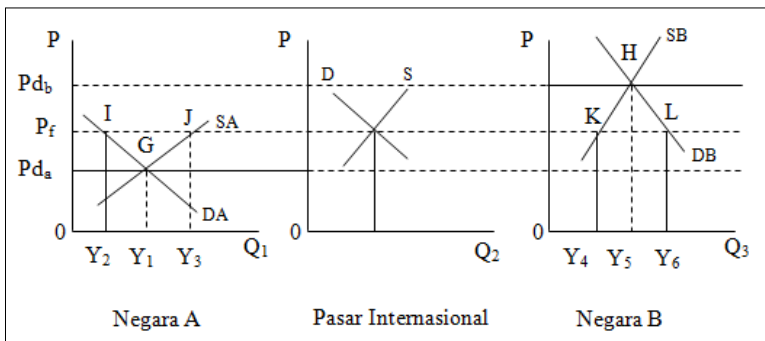
Teori *Heckscher-Ohlin* (H-O) menjelaskan beberapa pola perdagangan dengan baik, negara-negara cenderung untuk mengekspor barang-barang yang menggunakan faktor produksi yang relatif melimpah secara intensif. Menurut Heckscher-Ohlin, suatu negara akan melakukan perdagangan dengan negara lain disebabkan negara tersebut memiliki keunggulan komparatif yaitu keunggulan dalam teknologi dan keunggulan faktor produksi. Basis dari keunggulan komparatif adalah:

- a. *Faktor endowment*, yaitu kepemilikan faktor-faktor produksi didalam suatu negara.

b. *Faktor intensity*, yaitu teknologi yang digunakan didalam proses produksi, apakah *labor intensity* atau *capital intensity*.

Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan bahwa adanya perdagangan internasional karena terbatasnya sumber daya yang dimiliki oleh setiap negara. Dengan demikian salah satu kegiatan perdagangan internasional tersebut adalah ekspor dan impor demi memenuhi kebutuhan masyarakat di masing-masing negara dan mencari keuntungan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi setiap negara.

Adanya perdagangan akan memudahkan pemahaman mengenai perlunya menyelaraskan penawaran ekspor dengan persediaan nasional. Hal ini pada gilirannya akan memunculkan peluang bagi pembeli dan penjual barang tertentu. Permintaan impor kopi ke berbagai negara dari Indonesia dapat tercukupi, karena persediaan kopi nasional mencukupi kebutuhan konsumsi penduduk. Jumlah dan harga komoditas yang diekspor ditentukan setelah diketahui kurva penawaran dan persediaan yang merupakan perangkat geometris utama yang digunakan dalam rangka menganalisa pilihan kebijaksanaan dalam perdagangan. Secara lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut.



**Gambar 1.1. Keseimbangan Harga di Pasar Internasional**

- Pf : Harga keseimbangan harga pasar internasional
- Pda : Harga keseimbangan di negara A sebelum adanya perdagangan internasional
- Pdb : Harga keseimbangan di negara B sebelum adanya perdagangan internasional
- Oy1 : Konsumsi di negara A sebelum adanya perdagangan internasional
- Oy4 : Konsumsi di negara B sebelum adanya perdagangan internasional
- DA : Permintaan domestik negara A

- SA : Penawaran domestik negara B
- D : Permintaan di pasar internasional
- S : Penawaran di pasar internasional
- DB : Permintaan domestik negara B
- SB : Penawaran domestik negara B
- G : Titik keseimbangan komoditas y di negara A
- H : Titik keseimbangan komoditas y di negara B
- I : Permintaan domestik negara A setelah adanya perdagangan internasional
- J : Penawaran domestik negara A setelah adanya perdagangan internasional
- K : Penawaran domestik negara B setelah adanya perdagangan internasional
- L : Permintaan domestik negara B setelah adanya perdagangan internasional

Gambar 1.1 menunjukkan terjadinya perdagangan internasional antara dua negara. Sebelum adanya perdagangan internasional di negara A harga keseimbangan komoditas y pada titik G di negara A dan pada titik H di negara B, sedangkan konsumsi di negara A sebesar OY1 dan OY4 di negara B, pf adalah harga keseimbangan di pasar internasional yaitu diantara harga komoditas di negara A dan negara B, apabila harga y naik menjadi pf di negara A setelah adanya perdagangan internasional, maka konsumsi domestik menjadi OY2, sedangkan total penawaran komoditas y sebesar OY3 atau di titik J, dengan demikian jumlah komoditas y yang diekspor sebesar Y2-Y3, sedangkan di negara B konsumsi domestik menjadi OY6, sedang total penawaran komoditas y sebesar OY5 atau di titik K, sehingga jumlah yang diimpor sebesar Y5-Y6.

## B. KEBIJAKAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Berbagai tindakan yang dapat diterapkan suatu negara untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan perdagangan internasional, antara lain proteksi, perdagangan bebas, dan tindakan anti-*dumping*.

### 1. Proteksi

Proteksi adalah kebijakan perdagangan internasional yang ditujukan untuk melindungi produksi dalam negeri. Bentuk-bentuk perlindungan yang dapat dijalankan suatu negara, antara lain:

#### a. Larangan Impor

Melarang impor produk tertentu, termasuk produk di dalam negeri, terutama untuk barang-barang yang memiliki daya asing lemah.



- b. Tarif Impor  
Mengenakan tarif impor yang tinggi terhadap barang-barang tertentu membatasi akses pasar untuk barang-barang tersebut.
- c. Kuota  
Membatasi masuknya jumlah barang tertentu ke dalam negeri.
- d. Subsidi  
Memberi subsidi kepada produsen untuk meningkatkan produksinya agar dapat memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri.
- e. Premi  
Memberikan premi kepada produsen yang mampu mencapai jumlah produksi tertentu dengan kualitas yang baik sehingga memiliki daya saing.

## **2. Perdagangan Bebas**

Kebijakan perdagangan bebas adalah kebijakan dalam perdagangan internasional untuk menghilangkan hambatan-hambatan dalam perdagangan internasional. Penentuan dan penetapan harga diserahkan bebas, itu hanya berlaku bagi negara anggota yang tergabung dalam kelompok perdagangan bebas tersebut.

## **3. Politik Dumping**

Politik dumping adalah kebijakan perdagangan internasional yang menjual hasil produksi lebih murah di luar negeri dibandingkan di dalam negeri. Tujuan politik dumping adalah untuk meningkatkan daya saing untuk memperluas pasar.

## **C. PEMBAYARAN INTERNASIONAL**

Sistem atau metode pembayaran internasional merupakan suatu cara atau metode yang digunakan dalam menyelesaikan pembayaran akibat terjadinya transaksi ekonomi atau perdagangan internasional antarnegara. Adapun beberapa metode atau cara pembayaran internasional yang umum digunakan untuk memenuhi segala kewajiban dalam transaksi perdagangan internasional adalah:

### **1. Letter of Credit**

*Letter of Credit* (L/C) adalah surat pemberitahuan kredit yang merupakan bentuk perjanjian pembayaran di mana bank penerbit kepada eksportir senilai L/C sepanjang eksportir memenuhi syarat. Pada dasarnya pembayaran L/C dapat dilakukan apabila dokumen yang dipersyaratkan telah sesuai dengan perjanjian atau kontrak yang telah dibuat. Dalam L/C minimal melibatkan 4 macam kontrak, yakni: kontrak jual-beli, kontrak penerbitan L/C, L/C, dan kontrak keagenan. Namun, pada pelaksanaan dalam transaksi pembayaran. Peristiwa ini menurunkan kredibilitas perusahaan Indonesia dalam

penggunaan L/C. L/C pada dasarnya memiliki berbagai jenis, di antaranya ialah:

a. *Revocable L/C*

*Revocable L/C* dimaksudkan pada jenis L/C yang dapat diubah atau dibatalkan setiap saat oleh *applicant* (importir) atau bank importir tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada eksportir, sehingga menimbulkan risiko kerugian pada eksportir karena tidak terjaminnya pembayaran wesel yang diajukan. Risiko tersebut menjadi pertimbangan bagi eksportir untuk menggunakan *revocable L/C*.

b. *Irrevocable L/C*

Jenis *irrevocable L/C* ini merupakan jenis L/C yang tidak dapat dibatalkan oleh pihak mana pun, baik oleh importir, eksportir, termasuk bank yang bersangkutan, yakni issuing bank (bank penerbit L/C).

c. *Straight L/C*

Jenis L/C yang mengatur kewajiban issuing bank/bank penerbit L/C kepada eksportir untuk membayar wesel dan jatuh tempo hanya pada issuing bank. Jika ada *nominated bank* (bank atas tunjuk yang melakukan akseptasi wesel) dalam *straight L/C* hanya berfungsi sebagai pengumpul dokumen, serta mengirimkan dokumen dan meminta pembayaran kepada issuing bank untuk dapat diteruskan kepada eksportir.

d. *Negotiation L/C*

L/C yang memberikan hak kepada issuing bank untuk memberi kuasa kepada *nominated bank* untuk melakukan negosiasi antarpembeli dan penjual.

e. *Acceptance L/C*

Jenis L/C yang memberikan kuasa kepada *issuing bank* untuk menguasai *nominated bank* agar menerima pembayaran yang diteruskan kepada eksportir.

f. *Confirmed L/C*

Jenis *confirmed L/C* yang dapat menunjuk bank koresponden untuk menjamin L/C ke bank lain atau langsung kepada eksportir.

g. *Unconfirmed L/C*

Jenis L/C yang dapat meminta *issuing bank* menunjuk *advising bank* untuk meneruskan L/C kepada eksportir melalui banknya. *Advising bank* dalam hal ini tidak memiliki tanggung jawab dalam hal apa pun.

h. *Restricted L/C*

Jenis L/C yang menegaskan bahwa *issuing bank* menunjuk satu bank tertentu untuk membayar, menerima wesel, atau menegosiasikan suatu dokumen yang sesuai dengan syarat dan kondisi L/C.

i. *Transferable L/C*

L/C yang memperkenankan eksportir pertama yang tercantum dalam L/C untuk meminta *nominated bank* memindahkan seluruh atau sebagian nilai L/C kepada satu atau beberapa eksportir lainnya.

j. *Back to Back L/C*

Jenis L/C yang dibuka oleh bank atas permintaan dan instruksi dari importir berdasarkan master L/C yang diterima bank lain, dan importir dalam hal ini bertindak secara merangkap sebagai eksportir dari master L/C. Jaminan atas L/C yang dibuka ialah master L/C, hasil negosiasi wesel master L/C yang akan digunakan untuk membayar ke *negotiating bank* atas *back-to-back L/C*.

k. *Revolving Bank L/C*

Jenis L/C yang dapat direalisasi secara berulang-ulang dalam jangka waktu dan jumlah tertentu dengan syarat/kondisi sama atau dapat diperbarui/dinyatakan kembali tanpa adanya *amendment/* penggantian khusus atas L/C tersebut.

l. *Red Clause L/C*

Jenis L/C yang di dalamnya terdapat kondisi khusus yang memberikan kuasa kepada confirming bank atau bank yang ditunjuk untuk melakukan pembayaran di muka kepada eksportir atau mengizinkan eksportir menarik uang muka sebelum penyerahan dokumen seperti yang dipersyaratkan L/C.

Selain, jenis-jenis dari *Letter of Credit (L/C)*, terdapat metode pembayaran lain yang dipergunakan dalam transaksi ekspor-impor, metode ini terdapat beberapa jenis cara pembayaran, di antaranya:

**2. *Advance Payment***

*Advance payment* merupakan salah satu bentuk cara pembayaran non-L/C yang dikenal dalam berbagai kontrak bisnis, termasuk kontrak bisnis internasional.

Sistem Prabayar ini sering disebut dengan “pembayaran di muka”, artinya importir membayar terlebih dahulu kepada eksportir melalui perintah wire transfer ke rekening eksportir, sebelum eksportir yang bersangkutan mengirimkan barang yang diperjanjikan. Setelah menerima pembayaran seluruhnya atau sebagian, eksportir melakukan kewajiban untuk memindahkan barang melalui port of loading. Pengiriman telah terdaftar atas nama importir. Uang muka biasanya hanya diberikan dalam jumlah kecil dalam suatu transaksi bisnis, baik (eksportir -importir) saling percaya, atau importir memang sangat membutuhkan barang yang ada pada eksportir. Hal ini menjadi dorongan bagi importir untuk melakukan metode pembayaran *advance payment*.

Ada beberapa variasi metode pembayaran cicilan, yaitu: dalam konteks pembayaran secara keseluruhan, importir membayar keseluruhan harga barang termasuk ongkos angkut, asuransi, dan semua biaya yang disepakati dalam kontrak bisnis mereka. Dengan mengajukan harga tersebut, importir telah memenuhi semua kewajibannya mengenai pembayaran, dan oleh karena itu tidak ada lagi biaya tambahan yang harus dibayar oleh importir. Metode ini disebut dengan istilah *payment with order*. Namun, dalam pelaksanaannya, *advance payment* belum memiliki ketentuan internasional. Hanya diatur berdasarkan kebiasaan internasional. Di Indonesia, *advance payment* dilakukan berdasarkan praktik perbankan Indonesia.

### **3. *Partial Payment with Order***

Dalam sistem pembayaran ini importir hanya membayar sebagian dari harga terlebih dahulu, misalnya hanya membayar harga barang saja. Biaya lain sesuai yang diperjanjikan, misalnya ongkos angkut, asuransi, dan biaya lainnya akan dibayar oleh importir setelah eksportir melakukan kewajibannya mengirimkan barang. Pemungutan sisa pembayaran oleh eksportir biasanya dilakukan dengan menggunakan sistem *collection*.

### **4. *Open Account***

Cara pembayaran pada *open account* adalah melalui eksportir yang mengirimkan barang terlebih dahulu melakukan pengiriman barang, baru setelah itu importir membayar harga melalui perintah transfer bank ke rekening eksportir. Dalam *open account* nama pemilik barang yang tercantum dalam dokumen ekspor sudah atas nama importir. Dokumen yang diserahkan oleh eksportir kepada importir dapat melalui bank. Namun, pengiriman dokumen-dokumen tersebut ke bank hanya sebatas pengiriman ekspres saja.

Pembayaran yang dilakukan dengan *open account* akan sangat menguntungkan bagi importir, karena melalui sistem ini importir terlebih dahulu melihat barang yang dikirimkan oleh eksportir. Importir dapat berkonsultasi terlebih dahulu dan mengecek spesifikasi barang yang telah disepakati, kemudian melakukan pembayaran. Dengan demikian, importir memiliki waktu untuk menyatakan penolakan atas barang yang telah dikirimkan oleh eksportir. Keuntungan lain adalah importir memiliki waktu yang cukup longgar untuk menyediakan dana guna keperluan pembayaran.

### **5. *Consignment (Konsinyasi)***

Konsinyasi juga dikategorikan sebagai cara pembayaran transaksi. Konsinyasi sebenarnya merupakan variasi lain dari cara pembayaran dengan *open account*. Melalui konsinyasi eksportir yang terlebih dahulu mengirimkan barang. Perbedaannya dengan *open account* adalah mengenai waktu importir mengirimkan barang. Kalau pada *open account* importir mengirimkan barang kepada importir setelah barang dikirimkan atau pada waktu tertentu yang

disepakati kemudian dilakukan pembayaran, maka pada konsinyasi importir berkewajiban melakukan pembayaran atas barang setelah importir berhasil menjual barang tersebut kepada pihak ketiga.

Cara pembayaran seperti ini cenderung mengandung risiko yang sangat besar bagi eksportir. Kemungkinan terjadinya wanprestasi sangat besar dan dalam keadaan tertentu sulit terpantau. Kemungkinan wanprestasi, antara lain:

- a. Importir tidak membayar harga kepada eksportir;
- b. Importir telah berhasil menjual barang tersebut kepada pihak ketiga, akan tetapi importir menunda pembayaran kepada eksportir dan menyatakan barang tersebut belum lagi terjual. Dengan demikian, importir mendapat keuntungan dari penundaan pembayaran tersebut; atau
- c. Bila importir telah menjual barang tersebut kepada pihak ketiga pada saat terjadinya kenaikan atas harga barang tersebut, tetapi kemudian memberitahukan kepada eksportir bahwa barang tersebut dijual kepada pihak ketiga pada saat sebelum terjadinya kenaikan harga.

Oleh karena besarnya kemungkinan risiko yang mungkin dialami oleh eksportir, maka dalam kontrak-kontrak yang mempergunakan cara pembayaran konsinyasi seperti ini dilengkapi dengan klausula yang tegas tentang ganti rugi atau sanksi dalam hal terjadinya wanprestasi. Pengenalan yang baik tentang berbagai bentuk klausula ganti rugi akan sangat membantu menghindari kerugian. Juga sangat penting diatur tentang mekanisme pengawasan dalam kontrak-kontrak konsinyasi.

Mengingat risiko dalam kontrak konsinyasi, maka umumnya kontrak-kontrak konsinyasi jarang dipergunakan, kecuali oleh pihak-pihak yang telah lama saling mengenal baik, mengetahui reputasi masing-masing, dan yang terpenting para pihak telah berulang kali melakukan transaksi atau kerja sama bisnis lainnya.

Meskipun demikian, kontrak-kontrak yang mempergunakan cara konsinyasi dalam pembayaran juga mempunyai berbagai keuntungan. Bagi eksportir, akan memperoleh keuntungan berupa kemudahan untuk memasarkan barangnya di luar negeri, karena cara ini banyak diminati importir. Sementara itu bagi importir, sangat menguntungkan karena tidak perlu mengeluarkan dana untuk pembayaran harga barang terlebih dahulu.

## **6. Collection (Inkaso)**

*Collection* (inkaso) adalah pembayaran dokumen ekspor oleh importir menggunakan jasa bank untuk melaksanakan penagihan atas harga suatu barang ekspor-impor. Oleh karena itu, dalam *collection*, eksportir bertindak sebagai *principal* yang memberikan kepercayaan kepada bank untuk melakukan penagihan kepada importir. Bank penerima amanat untuk melakukan penagihan (*remitting bank*) setelah menerima dokumen akan

meneruskan *collection*. *Remitting bank* setelah menerima dokumen *collection* selanjutnya meneruskan dokumen tersebut ke *collecting bank* (bank yang ditunjuk oleh pembeli) dengan menggunakan *collection instruction*. *Collecting bank* inilah yang akan meneruskan dokumen kepada pihak yang harus membayar (*drawee/importir/pembeli*).

Dalam hal *collecting bank*, *principal* belum bisa langsung meneruskan dokumen kepada *drawee*, maka *collecting bank* meneruskan ke bank lain (*presenting bank*) yang memungkinkan untuk berhubungan langsung dengan *drawee*. Setelah *drawee* melakukan pembayaran atau melaksanakan amanat kepada *collection bank* atau *presenting bank*, maka *collecting bank* akan meneruskan kembali kepada *remitting bank*. *Remitting bank* inilah yang akan melakukan pembayaran kepada *principal*.

Untuk menghindari kesalahpahaman mengenai tata cara pembayaran transaksi dengan mempergunakan *collection*, *International Chamber of Commerce* (ICC) menerbitkan *Uniform Rules for Collection* (URC), yang terakhir direvisi pada tahun 1995 tercatat dengan nomor publikasi 522 (URC 522). Berdasarkan URC 522 cara pembayaran dengan *collection* dapat terjadi dengan dua metode, yaitu: *document against payment* dan *document against acceptance*. Dalam *document against payment*, *collecting bank* yang ditunjuk importir menahan dokumen- dokumen pemilikan barang impor dan hanya menyerahkan dokumen impor setelah adanya pembayaran penuh dari importir. Sedangkan dalam *document against acceptance*, eksportir melalui *collecting bank* akan menyerahkan dokumen ekspor setelah importir telah melakukan akseptasi atas *time draft/time bill of exchange*.

Sistem pembayaran melalui metode *collection* apabila dilihat dari kemungkinan risiko yang dimunculkan memang tergolong metode pembayaran yang aman dibandingkan dengan metode *open account*. Terutama pada *document against payment* karena dalam metode tersebut, bank menahan kepemilikan dokumen kepada importir sebelum importir melakukan pembayaran tunai kepada eksportir, tidak seperti pada *open account* yang melakukan tindakan pengiriman barang terlebih dahulu, dan importir memiliki akses melihat barang yang dikirim oleh eksportir, baru dilakukan pembayaran. Meski kurang berisiko dari *open account* atau sistem pembayaran lainnya, namun ada beberapa hal yang patut diwaspadai dalam melakukan metode ini, di antaranya:

- a. Penarik-uluran jangka waktu pembayaran;
- b. Eksportir harus menanggung biaya bongkar yang kedaluwarsa atau telah melampaui jangka waktu penyewaan kapal (*demurrage*);
- c. Biaya pengapalan kembali apabila importir wanprestasi;
- d. Pembatalan pembayaran sepihak oleh importir.

#### D. NERACA PEMBAYARAN INTERNASIONAL

Definisi neraca pembayaran adalah laporan ringkas dan sistematis dari transaksi internasional suatu negara pada periode tertentu. Laporan ini menyangkut semua transaksi antara suatu negara dengan negara-negara lain di dunia, yang diterbitkan secara berkala. Sistem neraca pembayaran ini dicatat dengan menggunakan sistem *double entry*, yaitu aliran masuk dicatat sebagai kredit (+) dan aliran keluar dicatat sebagai debit (-). Setiap kredit atau debit diimbangi dengan debit atau kredit pengimbng. Dengan pencatatan seperti ini, maka penjumlahan dari semua transaksi adalah nol. Karena adanya prinsip keseimbangan tersebut, maka neraca pembayaran ini selaluu menjunjung keadaan seimbang.

Teori neraca pembayaran dibuat untuk membantu menganalisis kinerja ekonomi dan keuangan suatu negara secara makro. Untuk memberikan pengertian tentang neraca pembayaran secara mudah, diilustrasikan dengan perbandingan antara level korporat (mikro) dan nasional (makro) sebagai berikut:

**Tabel 1.1. Perbandingan Korporat dan Nasional**

<b>Korporat (Mikro)</b>	<b>Nasional (Makro)</b>
1. Neraca Aktiva/Pasiva	Arus barang, jasa dan modal
2. Pembayaran Laba/Rugi	Perubahan posisi keuangan

Komponen utama dari neraca pembayaran adalah neraca barang (*trade account*); transaksi berjalan (*current account*); neraca modal (*capital account*); neraca cadangan pemerintah (*official reserve account*). Neraca barang merupakan bagian dari transaksi berjalan. Seperti telah dijelaskan dalam system *double entry*, maka penjumlahan dari neraca-neraca tersebut adalah nol. Karena banyaknya sumber data yang dalam kenyataannya apabila dijumlahkan tidak sama dengan nol, maka diperkenalkan perbedaan statistic (*statistical discrepancy*).

Walaupun neraca pembayaran ini sifatnya makro nasional, tetapi menjadi penting karena akan memengaruhi lingkungan bisnis perusahaan internasional di suatu negara. Disamping itu, neraca pembayaran memberikan indikasi aliran barang, jasa dan kapital antar negara.

##### **1. Neraca Transaksi Berjalan (*Current Account*)**

Neraca transaksi berjalan terdiri atas neraca perdagangan barang, jasa dan transfer unilateral. Neraca perdagangan barang adalah neraca arus perdagangan barang, ekspor dan impor barang. Keduanya dihitung berdasarkan syarat fob (*free on board*). Neraca perdagangan jasa adlaah neraca arus perdagangan jasa, ekspor dan impor jasa yang termasuk disini

antara lain pendapatan dari investasi termasuk bunga dan deviden, pariwisata, kegiatan finansial perbankan dan asuransi, serta pengeluaran pengapalan dan angkutan udara. Ekspor dalam aliran keuangan sebagai penerimaan adalah kredit (+) dan impor sebagai pengeluaran adalah debit (-).

## **2. Neraca Modal (*Capital Account*)**

Neraca modal adalah neraca arus perubahan aset atau harta kekayaan suatu negara, termasuk aset pemerintah dan aset asing di negara itu, diluar aset cadangan pemerintah. Transaksi yang dicatat meliputi investasi portofolio pembelian sejumlah aset keuangan dengan maturitas lebih dari satu tahun, investasi langsung dimana investor melakukan control manajemen di perusahaan tersebut dan investasi jangka pendek kurang dari satu tahun. Hutang piutang pemerintah dicatat dalam neraca modal. Modal masuk ke suatu negara (*capital inflow*) adalah kredit (+) dan modal keluar suatu negara (*capital outflow*) adalah debit (-).

## **3. Neraca Cadangan Pemerintah (*Official Reserve Account*)**

Neraca cadangan pemerintah adalah neraca arus perubahan aset cadangan milik pemerintah suatu negara dan pemerintah asing di negara itu. Cadangan aset pemerintah dapat berupa emas, *special drawing right* / sdm imf, dan devisa. Perubahan pada neraca cadangan pemerintah menunjukkan surplus atau deficit suatu negara dalam transaksi berjalan dan atau/ neraca modalnya, dengan mengetahui sisa cadangan atau aset yang dimiliki oleh suatu negara. Kenaikan cadangan aset pemerintah diluar negeri adalah debit (-) dan kenaikan cadangan aset asing masuk ke suatu negara adalah kredit (+).

## **4. Surplus / Deficit Neraca Pembayaran**

*System double-entry booking* adalah sistem pembukuan berpasangan untuk penjualan dan penerimaan. Dalam system neraca pembayaran, tiap transaksi internasional di catat sebagai kredit atau debit dan sebaliknya, setiap kredit dan debit, diimbangi dengan debit atau kredit pengimbang. Neraca pembayaran harus selalu berimbang secara akuntansi, dimana total kredit dan debit harus selalu sama. Apabila tidak seimbang, ada pos selisih statistik yaitu jumlah dari neraca transaksi berjalan, neraca modal dan aset neraca cadangan pemerintah yang akan membuat nilainya nol (seimbang).

Transaksi pada neraca transaksi berjalan dan neraca modal adalah pos-pos otonom karena berorientasi bisnis dan mencari keuntungan, kecuali apabila ada pos transfer unilateral. Tidak semua negara mempunyai pos transfer unilateral. Transaksi pada neraca cadangan pemerintah adalah pos-pos akomodatif karena digunakan untuk menyeimbangkan transaksi-transaksi yang terjadi sehingga neraca pembayaran menjadi seimbang. Defisit. Neraca pembayaran adalah debit pada pos-pos otonom termasuk selisih statistik dan itu berarti kredit ada pos-pos akomodatif. Surplus neraca



pembayaran adalah kredit pada pos-pos otonom termasuk selisih statistik dan itu berarti debit pada pos-pos akomodatif.

### **5. Penyesuaian Neraca Pembayaran**

Dalam neraca pembayaran suatu negara, ketidakseimbangan dari pos-pos otonom merupakan arus otonom dengan alasan yang mendasarinya. Perkembangan ekspor dan impor, serta aliran modal masuk dan keluar suatu negara sangat terkait dengan faktor kebijakan dalam negeri terutama kebijakan moneter dan sektor riil, dan perkembangan lingkungan internasional. Neraca pembayaran mencerminkan keunggulan kompetitif produksi barang dan jasa, dan peluang investasi. Sesuai dengan prinsip pembukuan dengan double entry. Apabila terjadi surplus atau deficit biasanya mengacu pada hubungan sebab akibat.

Penyesuaian terhadap posisi neraca pembayaran perlu dilakukan dari waktu ke waktu. Pada dasarnya koreksi terhadap neraca pembayaran dapat dilakukan secara otomatis atau melalui serangkaian kebijakan. Koreksi neraca pembayaran dapat dilakukan secara otomatis dikaitkan dengan menciptakan keseimbangan harga internal dan eksternal. Dalam hal ini konsep neraca pembayaran disederhanakan sebagai aliran ekspor dan impor dari barang dan jasa. Apabila defisit neraca pembayaran terjadi pada sistem kurs tetap, maka defisit neraca pembayaran akan diperbaiki dengan depresiasi dari mata uang negara itu. Dengan melakukan depresiasi mata uangnya, maka harga barang dan jasa eksternal diusahakan agar seimbang dengan harga internalnya. Hal yang sama pada sistem kurs mengambang, penyesuaian dilakukan secara otomatis dengan depresiasi dari mata uang negaranya. Dalam kurs mengambang, diatur deficit neraca pembayaran yang sebagian dengan menggunakan saldo kredit neraca cadangan pemerintah. Sebaliknya, hal yang sama dapat dilakukan pada surplus neraca pembayaran.

Koreksi neraca pembayaran dilakukan dengan intervensi dari kebijakan pemerintah dikaitkan dengan kebijakan fiskal, moneter dan sektor riil yang mendorong keseimbangan internal dengan eksternal. Jika terjadi deficit, maka pemerintah dapat memberikan rangsangan atau pengurangan pajak dan mendorong peningkatan pengeluaran pemerintah. Langkah kebijakan moneter yang dapat ditempuh disamping pengaturan kurs mata uang yang beredar untuk menekan inflasi. Kebijakan sektor riil menjadi penting terutama di negara-negara berkembang untuk mengatur struktur pasar dan pemberian proteksi untuk mendorong peningkatan ekspor.

Walaupun dalam teori terhadap neraca pembayaran dapat dilakukan dengan depresiasi mata uang, pada kenyataannya Langkah depresiasi tidak sensitif dalam memperbaiki defisit neraca pembayaran. Sebagai contoh defisit neraca transaksi berjalan yang terjadi di Amerika, pada tahun 1976 sampai

1980, dolar Amerika merosot seiring dengan penurunan transaksi berjalannya. Pada tahun 1980 sampai 1985, dolar Amerika menguat dan terjadi peningkatan impor serta penurunan ekspor Amerika sehingga transaksi berjalan tetap deficit. Pada pertengahan tahun 1985, dolar Amerika nilainya mulai merosot dan transaksi berjalan Amerika tetap mengalami deficit. Walaupun Amerika masih tetap mengalami deficit transaksi berjalan, tetapi mulai berkurang pada tahun 1987. Kesimpulannya bahwa depresiasi tidak mutlak merupakan instrument untuk menanggulangi deficit neraca pembayaran yang akan memberikan hasil yang baik.

Untuk lebih mengetahui contoh berbagai laporan neraca pembayaran dan perdagangan, disampaikan sebagai berikut:

Dalam contoh soal 1, table 1.2 adalah sistematika neraca pembayaran Indonesia tahun 1998/99, 1999/2000 dan 2000/01. Table 1.3 adalah ringkasan neraca pembayaran Indonesia untuk tahun 1998/99, 1999/2000 dan 2000/01. Table 1.4, 1.5, 1.6 dan 1.7 adalah rincian ekspor dari kelompok barang manufaktur, kelompok barang pertanian dan kelompok barang pertambangan untuk tahun 1998/99 dan 1999/2000. Table 1.8 menunjukkan penarikan pinjaman bantuan luar negeri untuk pemerintah dan Tabel 1.9 menunjukkan posisi pinjaman luar negeri pemerintah dan perusahaan pemerintah.

**Tabel 1.2. Rincian Neraca Pembayaran Indonesia**

	1998/1999	1999/2000	2000/2001
	Milliar \$		
A. Transaksi Berjalan	2,6	2,9	3,5
1. Barang	8,0	7,4	8,1
a. Ekspor Fob	35,30	36,5	42
i. Nonmigas	24,8	27,2	31,7
ii. Migas	10,5	9,3	10,3
- Minyak	6,4	5,5	6,2
- LNG	3,8	3,5	3,7
- LPG	0,3	0,3	0,4
b. Impor Fob	27,3	29,1	33,9
i. Nonmigas	23,8	25,3	30,4
ii. Migas	3,5	3,8	3,5
- Minyak	3,3	3,6	3,2
- LNG	0,2	0,3	0,3
2. Jasa	10,6	10,3	11,6
i. Nonmigas	7,2	7,3	8,5
ii. Migas	3,4	3,0	3,1
- Minyak	1,7	1,6	1,6

- LNG	1,7	1,4	1,5
B. Modal Diluar Sektor Moneter	5,2	5,7	4,5
1. Lalu lintas modal pemerintah bersih	0,9	1,1	0,1
a. Penerimaan pinjaman dan bantuan	5,7	6,2	5,6
b. Pelunasan pinjaman	4,8	5,1	5,5
2. Lalu lintas modal swasta bersih	4,3	4,6	4,4
a. Penanaman modal langsung	1,7	2,0	2,6
b. Lainnya	2,6	2,8	1,0
C. Selisih Perhitungan antara C dan E	1,2	1,9	0,4
D. Lalu Lintas Moneter	1,4	0,7	0,8
Catatan			
E. Cadangan Devisa Resmi Setara Impor Nonmigas (bulan)	12,0	12,7	13,3
	5,4	5,4	4,7
F. Transaksi Berjalan / PDB (%)	1,9	1,9	2,2

Sumber: Bank Indonesia

**Tabel 1.3. Ringkasan Neraca Pembayaran Indonesia**

	1998/1999	1999/2000	2000/2001
	Milliar \$		
A. Transaksi Berjalan	2,6	2,9	3,5
1. Ekspor Fob	35,30	36,5	42
2. Impor Fob	27,3	29,1	33,9
3. Jasa	10,5	10,3	11,6
B. Transaksi Modal	5,2	5,7	4,5
1. Lalu lintas modal pemerintah bersih	0,9	1,1	0,1
2. Lalu lintas modal swasta bersih	4,3	4,6	4,4
C. Lalu Lintas Moneter	1,4	0,7	0,8

Sumber: Bank Indonesia

Selama tiga tahun tampak bahwa transaksi berjalan mengalami deficit, tetapi transaksi modal positif dan menyebabkan kumulatif positif dari neraca pembayaran. Neraca perdagangan ekspor dikurangi impor sebenarnya menunjukkan angka positif, tetapi karena neraca jasa defisitnya cukup besar menyebabkan transaksi modal yang besar tampaknya dari lalu lintas modal swasta sekitar empat kali dari lalu lintas modal pemerintah.

**Tabel 1.4. Ekspor Kelompok Barang Manufaktur**

Jenis Barang	1998/1999	1999/2000	2000/2001	
	Perubahan (%)		Juta \$	Pangsa (%)
Tekstil dan produk tekstil	6,0	3,5	5.848	25,4
Produk kayu	38,5	9,2	5.537	24,0
Kayu lapis	35,5	20,0	3.607	15,6
Kayu Gergajian	54,4	24,9	184	0,8
Alas kaki	18,7	18,9	1.963	8,5
Peralatan elektronika	14,5	43,7	1.854	8
Kerajinan tangan	11,8	57,5	1.085	4,7
Kertas	26,1	71,1	890	3,9
Besi baja	12,2	9,9	496	2,2
Kelompok rotan	14,0	3,5	357	1,6
Rotan lampit	-38,4	3,6	14	0,1
Rotan furniture	18,2	1,7	306	1,3
Rotan lainnya	15,6	20,4	38	0
Lainnya	4,5	25,6	5.020	21,8
Jumlah	9,8	11,4	23.049	100,0

Sumber: Bank Indonesia

**Tabel 1.5. Nilai Ekspor Kelompok Komoditas Pertanian**

Jenis Barang	1998/1999	1999/2000	2000/2001	
	Perubahan (%)		Juta \$	Pangsa (%)
Karet alam	9,2	46,6	1.428	24,0
Kopi	28,7	173,9	946	15,9
Minyak sawit	10,1	88,9	1.047	17,6
Udang dan hasil hewan lainnya	14,6	17,1	1.729	29,1
Udang	16,6	18,4	1.046	17,6
Hasil hewan lainnya	11,7	15,2	683	11,5
Teh	1,5	-25,7	107,0	1,8

Lainnya	0,8	-21,4	685	11,5
Jumlah	5,0	36,1	5.942	100,0

Sumber: Bank Indonesia

Keterangan Tabel 1.4 dan Tabel 1.5 dari produk manufaktur, ekspor terbesar dari Indonesia dilaporkan dari tekstil dan produk tekstil, serta produk kayu. Untuk produk pertanian, hasil terbesarnya dari udang dan hasil hewan lainnya serta hasil karet alam. Secara keseluruhan, ekspor migas sekitar 25% dari total ekspor Indonesia, dan sisanya adalah ekspor non migas. Dari ekspor non-migas, ekspor produk manufaktur cukup besar dan sekitar empat kali lipat dari ekspor produk pertanian.

**Tabel 1.6. Nilai Ekspor Kelompok Komoditas Pertambangan**

Jenis Barang	1998/1999	1999/2000	2000/2001	
	Perubahan (%)		Juta \$	Pangsa (%)
Timah	41,5	46,6	1.428	24,0
Tembaga	1,8	21,9	907	33,3
Aluminium	-17,8	42,4	236	8,7
Nikel	14,5	11,7	368	13,5
Emas	17,0	-27,2	147	5,4
Hasil tambang lainnya	8,6	24,8	937	34,4
Jumlah	2,1	29,1	2.725	100,0

Sumber: Bank Indonesia

Nilai ekspor produk pertambangan, walaupun masih lebih kecil dari nilai ekspor produk manufaktur, tetapi mampu memberikan dampak penggandaan yang cukup besar bagi pembangunan daerah tambang dan sekitarnya karena kebanyakan lokasinya berada di daerah terpencil.

**Tabel 1.7. Penarikan Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri Pemerintah**

Rincian	1998/1999	1999/2000	2000/2001	
	Juta \$	Pangsa (%)	Juta \$	Pangsa (%)
CGI*	5,778.0	93,9	5,210.0	97,5
ODA	4,022.0	64,9	3,799.0	67,2
Program 1				
Proyek	4,022.0	64,9	3,799.0	67,2
Bukan ODA 2	1,756.0	28,3	1,711.0	30,3

Diluar (proyek)	CGI	417.0	6,7	152.0	2,5
ODA		6.0	1	111.0	1,8
Bukan ODA 3		411.0	6,6	41,0	0,7
Jumlah		6,195.0	100,0	5.651.0	100,0

Sumber: Bank Indonesia

1. Pinjaman khusus yang bersyarat lunak dalam rangka membantu program pemerintah.
2. Sebagian besar adalah fasilitas kredit ekspor (FKE) dan termasuk pinjaman khusus dari Bank Exim Jepang.
3. Sebagian besar berupa pinjaman komersial  
\*CGI: *Consultative Group on Indonesian*  
ODA: *Official Development Agent*

**Tabel 1.8. Posisi Pinjaman Luar Negeri Pemerintah dan Perusahaan Pemerintah**

Rincian	1997/1998	1998/1999	1999/2000	2000/2001
	Posisi		Perubahan	
	Milliar \$			
Pinjaman Pemerintah	55.0	62.6	4.1	7.6
Pinjaman lama 1	0.8	0.7	0.1	0.1
Pinjaman baru	54.2	61.9	4.2	7.7
CGI	5.5	58.8	5.2	8.3
ODA 2	37.1	42.5	3.3	5.4
Bukan ODA 3	13.4	16.3	1.9	2.9
Diluar CGI	3.7	3.1	1.0	0.6
ODA	1.3	1.3	0.0	0.0
Pinjaman				
Perusahaan pemerintah 4	5.0	4.8	0.5	0.2
Jumlah	60.0	67.4	4.6	7.4

Sumber: Bank Indonesia

1. Pinjaman lama adalah pinjaman yang diperbolehkan sebelum bulan Juli 1996
2. Terdiri atas bantuan program murni, bantuan program dalam bentuk pinjaman khusus bersyarat lunak dalam rangka membantu program pemerintah dan bantuan proyek
3. Termasuk pinjaman khusus dari Bank Exim Jepang
4. Termasuk pinjaman *non-recourse* Pertamina

## **E. SEBAB TIMBULNYA PERDAGANGAN INTERNASIONAL**

Perdagangan internasional disebabkan adanya perbedaan masing-masing negara, antara lain:

1. Perbedaan jumlah penduduk dalam perbandingan luas tanah.
2. Perbedaan kekayaan alam yang dimiliki.
3. Perbedaan tingkat kecerdasan dan peradaban bangsanya.
4. Perbedaan iklim dan keadaan alam.
5. Perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasai.
6. Perbedaan politik, sosial, dan budaya.

## **F. DAMPAK PERDAGANGAN INTERNASIONAL TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA**

Dalam era modern ini orang sering mengatakan bahwa dunia itu menjadi tanpa batas. Sesuatu yang terjadi di negara lain dapat kita ketahui dan dapat dengan cepat memengaruhi masyarakat di negara kita, maka sering disebut era globalisasi.

### **1. Dampak Positif Ekspor**

- a. Memperluas lapangan kerja.
- b. Meningkatkan cadangan devisa.
- c. Memperluas pasar karena dapat memasarkan hasil produksi ke seluruh dunia.

### **2. Dampak Negatif Ekspor**

- a. Menimbulkan kelangkaan barang di dalam negara.
- b. Menyebabkan eksploitasi besar-besaran sumber daya alam.  
Misalnya: ekspor barang tambang telah menyebabkan semakin tipisnya cadangan bahan tambang dan menimbulkan kerusakan alam/lingkungan.

### **3. Dampak Positif Impor**

- a. Meningkatkan kesejahteraan konsumen karena masyarakat Indonesia dapat menggunakan barang-barang yang tidak terdapat di dalam negeri.
- b. Meningkatkan industri dalam negeri, terutama yang bahan bakunya berasal dari luar negeri.
- c. Dengan adanya impor memungkinkan terjadinya alih teknologi secara bertahap negara kita mencoba mengembangkan teknologi modern untuk mengurangi ketertinggalan kita dengan bangsa yang sudah maju.

#### **4. Dampak Negatif Impor**

- a. Menciptakan pesaing bagi industri dalam negeri.
- b. Menciptakan pengangguran, artinya kita telah kehilangan kesempatan untuk membuka lapangan kerja.
- c. Konsumerisme, artinya konsumen berlebihan, terutama untuk barang-barang mewah.

Contoh: pakaian mewah, mobil mewah, dan alat-alat rumah tangga mewah.



## DAFTAR PUSTAKA

- Arianstuti, N. (2011). *Studi Pengaruh Perubahan Nilai Tukar Rupiah Per Dolar AS Terhadap Inflasi Selama Periode Inflation Targeting di Indonesia*.
- Atmadja, A. S. (1999). Inflasi Indonesia: Sumber-Sumber Penyebab dan Pengendaliannya. *Akutansi Dan Keuangan*, 1(1), 54–67.
- Bank Indonesia. (2016). *Pengenalan Inflasi, Disagregasi Inflasi*. Bank Indonesia.
- Boediono. (1985). *Ekonomi Moneter* (Edisi 3). BPFE.
- BPS. (2013). *Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2013*. BPS.
- Choudhri, E. U., & Hakura, D. S. (2006). Exchange Rate Pass-through to Domestic Prices: Does the Inflationary Environment Matter? *Journal of International Money and Finance*, 239–259.
- Dalal, M. N., & Schacher, G. (1988). Transmission of International Inflation to India : A Structural Analisis. *Journal of Developing Areas*, No 23, 85–104.
- Dewayany, H. P. (2012). *Analisis Pengaruh Fluktuasi Nilai Tukar Pasca Penerapan Sistem Nilai Tukar Mengambang Terkendali dan Implikasi Penerapan Inflation Targeting Framework Terhadap Inflasi di Indonesia*.
- Ginting, A. M. (2016). *Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Inflasi: Studi Kasus Di Indonesia Periode Tahun 2004-2014*. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
- Investments, I. (2020). *Inflasi di Indonesia (Indeks Harga Konsumen)*.
- Juhro, S. M. (2007). Karakteristik Tekanan Inflasi Di Indonesia: Pengaruh Dinamis Sisi Permintaan dan Penawaran Prospek Ke Depan. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*.
- KPR Academy. (2020). *Yuk Kenalan Dengan Bank*.
- Langi, T. M. (2014). Analisis Pengaruh Suku Bunga BI, Jumlah Uang Beredar dan Tingkat Kurs Terhadap Tingkat Inflasi di Indonesia. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 14(2), 44–58.
- Mankiw, G., Quah, E., & Wilso, P. (2013). *Pengantar Ekonomi Makro Principles of Economics*. Salemba Empat.
- Mankiw, N. G. (2007). *Macroeconomics, 6th edition*. Erlangga.
- Mankiw, N. G. (2008). *Makroekonomi Edisi Keenam*. Erlangga.
- Nopirin. (1992). *Ekonomi Internasional* (Edisi 3). BPFE.
- Nugroho, T. G. (2016). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Inflasi Di Indonesia (Tahun 1990-2014)*.
- Pohan, A. (2008). *Potret Kebijakan Moneter Indonesia*. Raja Grafindo

Persada.

- Priyono, & Chandar, T. (2016). *Esensi Ekonomi Makro*. Zifatama.
- Raharjo, A. W., & Elida, T. (2015). *Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank di Indonesia*. UI-Press.
- Ridhwan, M. H. . (2013). Dinamika dan Heterogenitas Inflasi Regional di Indonesia. *Kajian Ekonomi Regional Bank Indonesia*.
- Simorangkir, I., & Suseno. (2004). *Sistem dan Kebijakan Nilai Tukar*. Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia.
- Suseno, & Astiyah, S. (2009). Inflasi. In *Buku Kebanksentralan*. PPSK BI.
- Utari, G. A. D., S, R. C., & Pambudi, S. (2016). *Inflasi Di Indonesia: Karakteristik dan Pengendaliannya*. Bank Indonesia Institut.

## BIOGRAFI PENULIS

**Dewi Mahrani Rangkuty** adalah seorang Dosen Tetap Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan sejak tahun 2015. Pendidikan S-1 diselesaikan pada tahun 2010 pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Negeri Padang. Pendidikan S-2 diselesaikan pada tahun 2014 pada Program Studi Magister Ekonomi Pembangunan Universitas Sumatera Utara. Pernah mengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara juga Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Selain aktif mengajar, juga aktif sebagai Editor dan Reviewer di beberapa jurnal publikasi ilmiah.

**Pengeran** adalah seorang dosen tetap di perguruan tinggi STIE Graha Kirana Medan mengajar sejak tahun 2013. Lulus pendidikan Sarjana (S-1) tahun 2001 pada program studi Manajemen perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Lulus pendidikan Magister (S-2) tahun 2013 pada program studi Magister Studi Pembangunan perguruan tinggi Universitas Sumatera Utara. Dan saat ini sedang melaksanakan studi pendidikan S-3 Program Manajemen di Universitas Prima Indonesia.

Buku Ekspor Impor adalah buku yang disusun oleh Dewi Mahrani Rangkuty, S.E., M.Si. dan Pangeran, S.E., M.SP. keduanya merupakan dosen tetap di Perguruan Tinggi Swasta Kota Medan serta aktif di berbagai kegiatan akademis lainnya.

Transaksi perdagangan luar negeri yang lebih dikenal dengan istilah ekspor impor pada dasarnya adalah suatu transaksi yang sederhana dan terjadi proses membeli dan menjual barang/jasa, hanya yang menjadi perbedaan utama yakni proses jual beli tersebut yaitu pada lokasi negara yang berbeda. Banyak orang atau badan hukum yang melakukan penjualan barang ke luar negeri, kegiatan tersebut disebut ekspor, dan orang atau badan yang melakukannya dinamakan eksportir. Ekspor adalah penjualan barang ke luar negeri dengan menggunakan sistem pembayaran, kualitas, kuantitas dan syarat penjualan lainnya yang telah disetujui oleh pihak eksportir dan importir.

Buku ini berisi tentang pemahaman perdagangan internasional ekspor impor terdiri dari 6 bab yang dimulai dari pembahasan tentang perdagangan internasional, dilanjutkan hukum perdagangan internasional. Pada bab 3 dalam buku ini mengkaji kegiatan ekspor impor. Buku ini juga dilengkapi studi kasus hasil riset seputar ekspor impor di Indonesia. Buku ini disusun dengan sistematis dengan konsep yang mudah dipahami oleh pada pembaca.



CV. Tahta Media Group  
Surakarta, Jawa Tengah  
Web : [www.tahtamedia.com](http://www.tahtamedia.com)  
Ig : tahtamedia group  
Telp/WA : +62 896 5427 3996

ISBN 978-623-147-140-6



9 786231 471406